# Emilia Men

by UNITRI Press

**Submission date:** 21-Jun-2023 08:46AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1998199545

File name: Emilia\_Men.docx (50.93K)

Word count: 920

**Character count:** 6102

# RELASI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA DALAM PROSES PEMUNGUTAN PAJAK BUMI BANGUNAN DI DESA SIDORAHAYU KECAMATAN WAGIR KABUPATEN MALANG

# SKRIPSI

# **AKUNTANSI**



OLEH:
EMILIA MEN
2019110083

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI FAKULTAS EKONOMI MALANG 2023

# RINGKASAN

Penelitian ini mengkaji hubungan antara pemerintah kota dan daerah setempat terkait dengan pembagian pungutan tanah dan konstruksi di Kota Sidorahayu, Kawasan Wagir, Peraturan Malang. Di Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, penelitian ini mencoba memahami bagaimana interaksi aparat desa dan masyarakat setempat dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Prosedur yang digunakan dalam rencana penelitian ini bersifat unik dan arbitrer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa karena masalah keuangan, kurangnya tindakan tegas, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perlunya membayar pajak, hubungan masyarakat dengan Pemerintah Desa Sidorahayu tidak ideal.

Kata kunci: Masyarakat, Pemerintah, Pajak Bumi Bangunan

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Negara dituntut untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum negara, dimana keputusan pemerintah merupakan ahli publik yang mendapat legitimasi politik dari daerah, hal ini menunjukkan bahwa daerah telah memberikan legitimasi politik keputusan pemerintah mengenai perbuatan hukum yang didukung oleh daerah. Ini termasuk melindungi kebutuhan area pribadi terdekat atau kelompok klien individu (Harjudin, 2022).

Menurut Linklater (2019), kelangsungan hidup suatu bangsa terutama didasarkan pada bagaimana warganya memperlakukan hukumnya. Meneliti seberapa besar kepedulian rakyat terhadap pembayaran pajak kepada negara agar negara dapat mencapai pembangunan yang maksimal merupakan salah satu cara untuk mengetahui seberapa loyal penduduk terhadap bangsanya. Pajak diyakini menarik sebagai bahan diskusi dan perdebatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara keseluruhan. Sementara banyak organisasi tidak senang dengan kinerja pajak, tidak mungkin membantah kontribusi pendapatan pajak, yang kini telah melampaui 80% pendapatan negara dalam negeri.

Dipercayai bahwa karena pajak terus memainkan peran yang lebih besar dalam masyarakat, pengetahuan publik tentang masalah yang terkait dengan pajak juga akan meningkat. Sebagian besar pendapatan pajak negara digunakan untuk menjalankan pemerintahan atas nama masyarakat. Karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, hal ini jelas berimplikasi baik bagi masyarakat luas maupun bagi dirinya sendiri.

Pajak merupakan salah satu unsur dalam proses pembayaran yang mungkin dianggap sangat perlu dan akan dikeluarkan oleh masyarakat negara yang didirikan berdasarkan undang-undang (Indrihastuti, 2020). Uang pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama suatu negara karena negara tanpa pajak terancam dianggap mati atau tidak mampu maju. Negara sejauh ini hanya memungut pajak atas warganya. Sebagian besar dari mereka adalah penduduk, sehingga mereka tidak tahu tanggung jawab apa yang dibayar, apa yang masuk ke negara, atau bagaimana interaksi itu dibayar.

Syarat-syarat berikut harus dipenuhi oleh Mardiasmo (2016) untuk melaksanakan prosedur pemungutan pajak: Tujuan pertama negara adalah memungut pajak secara adil dan merata. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak menilai retribusi sesuai dengan kriteria, seperti konsisten dan adil untuk setiap pos pajak. Kedua, kepada orang-orang yang secara sah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memungut pajak. Ketiga, negara harus mempertahankan standar tenaga kerja yang dikompensasi dengan biaya tunai. Orang-orang sebelumnya percaya bahwa negara menghabiskan uang pajak secara elit sehingga masyarakat umum tidak mengetahui tujuan sebenarnya. Mengingat betapa pentingnya pajak bagi kebutuhan negara dan masyarakat, administrasi mereka juga harus terbuka dan tunduk pada pengawasan publik yang kuat untuk mencegah ketimpangan di bidang perpajakan, yang juga merupakan pendapatan negara. Penerimaan pajak dihasilkan oleh dan untuk rakyat, oleh karena itu pengelolaannya harus transparan kepada masyarakat dan tunduk pada hukum.

Pelaksanaan penerimaan PBB tidak berhasil menurut temuan Romlah (2021) di Kantor Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, sebagai akibat tidak adanya inisiatif masyarakat dari wajib pajak dan jumlah uang yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. tujuan. Analis mencatat, ada beberapa hambatan untuk memungut Biaya Area dan Bangunan (PBB), seperti yang terjadi di Kota Sidorahayu, karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat setempat tentang perlunya membayar biaya. Masyarakat di Kota Sidorahayu akhir-akhir ini mengetahui siapa yang terlilit hutang. Masyarakat umum harus mengetahui bagaimana biaya dialokasikan dan untuk apa biaya tersebut digunakan karena jaringan tidak berpartisipasi dalam proses pengumpulan PBB seperti halnya penduduk. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan publik dari otoritas yang mengumpulkan, menyebarluaskan, dan menggunakan retribusi dalam hal ini otoritas publik. Peneliti tertarik untuk menyempurnakan judul penelitian dengan mempertimbangkan alasan dan penjelasan tersebut di atas "Relasi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang"

#### 1.2. Rumusan Masalah

Melihat konteks kesulitan tersebut di atas, maka topik yang diangkat oleh peneliti sebagai fokus kajian adalah: Bagaimana keberhasilan pemerintah desa di Desa Sidorahayu, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, berkolaborasi dengan masyarakat untuk memungut pajak bumi dan bangunan?

# 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui "Hubungan Masyarakat dengan Pemerintah Desa Dalam Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang".

# 1.4. Manfaat Penelitian

Jika isu dan tujuan yang disebutkan di atas diartikulasikan secara memadai, diharapkan penilaian ini akan secara efektif menangani dan memberi manfaat bagi persyaratan berikut:

#### 1. Bagi peneliti

- a. Mematuhi pedoman penulisan laporan penelitian bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang.
- Mengekspos peneliti pada keadaan kerja aktual di setting atau instansi
   Pemerintah Desa.
- c. Memberikan informasi khusus kepada siswa tentang pentingnya pemahaman "Hubungan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dalam Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir".

### 2. Bagi instansi Pemerintah Desa

- Memberikan kontribusi konsep dan wawasan yang mendalam kepada perusahaan terkait.
- b. Untuk memberikan konteks perlunya pemahaman hubungan antara kelurahan dan pemerintahan kota dalam pemungutan Bea Masuk Kawasan dan Bangunan (PBB).
- Mengirim teguran kepada pemerintah desa dan masyarakat pada saat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

# 3. Bagi pihak lain

 a. Memberikan referensi terhadap masalah penelitian agar dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Sebagai sumber kajian dengan topik yang sama.



# Emilia Men

ORIGIN	ORIGINALITY REPORT								
SIMIL	2% ARITY INDEX	12% INTERNET SOURCES	1% PUBLICATIONS	5% STUDENT PAPERS					
PRIMA	RY SOURCES								
1	digilibac	lmin.unismuh.a	c.id	2%					
2	etheses.	uin-malang.ac.i	d	2%					
3	adoc.pu Internet Source			2%					
4	Submitt Student Paper	ed to Universita	s Islam Malan	<b>1</b> %					
5	core.ac.			1 %					
6	rinjani.u Internet Sourc	nitri.ac.id		1 %					
7	id.123do			1 %					
8	ejurnal.ı Internet Sourc	umri.ac.id		1 %					
9	text-id.1	23dok.com		1 %					

Exclude quotes On Exclude matches Off

Exclude bibliography On

# Emilia Men